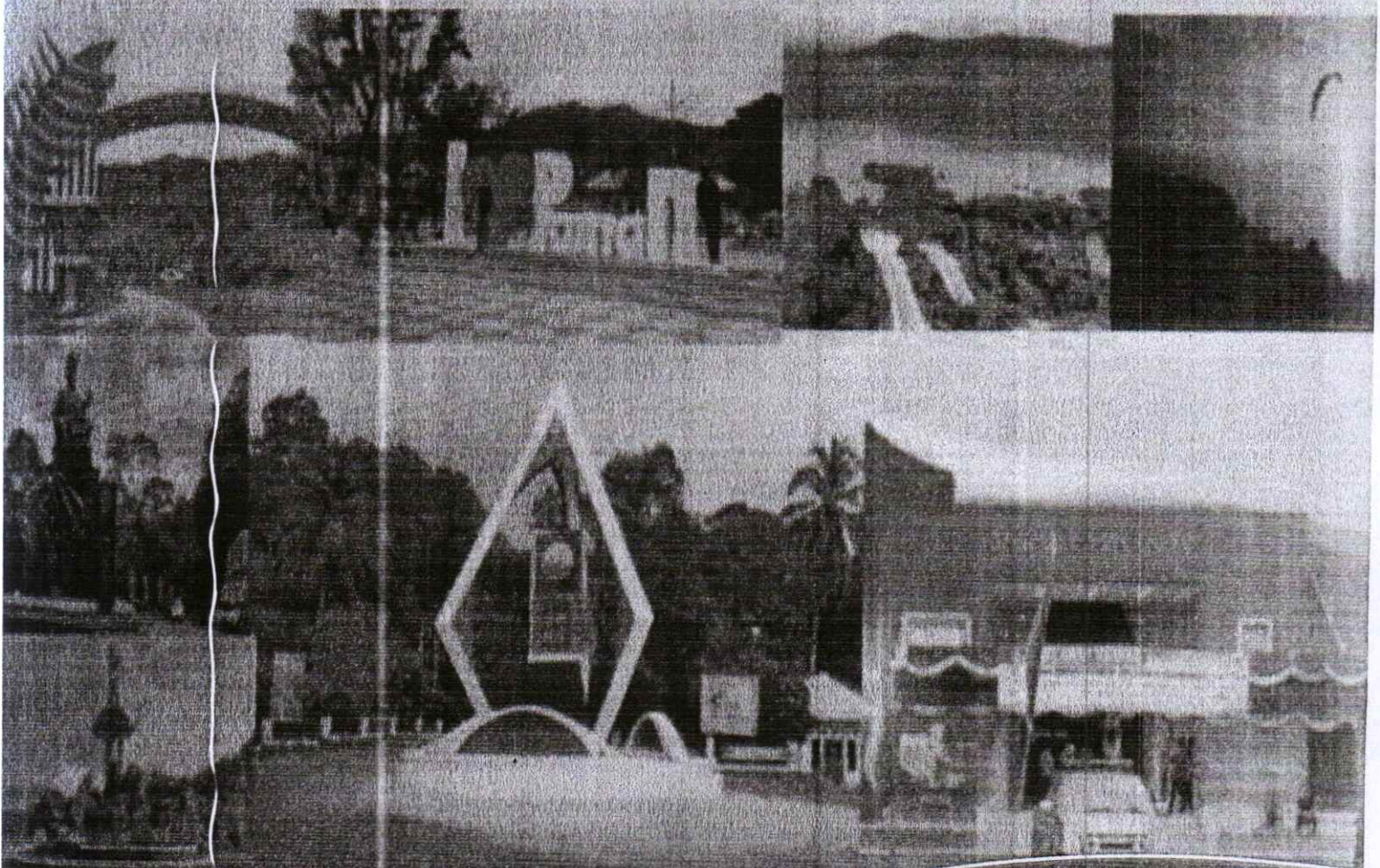


LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN



2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT maka atas rahmat-Nya, Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 telah dapat disusun sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikianlah Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat, semoga bermanfaat. Terima Kasih.

Sago, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA S ST MM

NIP. 19720101 199701 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Dinas PUTR

Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan

**BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2 Laporan Operasional
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 terdiri atas; (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Operasional, (3) Laporan Perubahan Ekuitas, (4) Neraca, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sago, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA S ST MM

NIP. 19720101 199701 1 001

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CALK	2022	2021
EKUITAS AWAL			
SURPLUS/DEBIT-LO		1.009.507.038.878,43	-
RK PPKD		44.264.626.284,00	-
DAMPAK KUMJLATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		181.636.021.611,00	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Lain-lain		52.668.615.522,53	-
Koreksi Ekuitas - Penyusutan		-	-
Koreksi Ekuitas - Piutang		-	-
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		-	-
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Dana Bergulir		-	-
Koreksi Ekuitas - Extra Comptable		-	-
Koreksi Ekuitas - Utang		-	-
Koreksi Ekuitas - Amortisasi		-	-
Koreksi Ekuitas - Setara Kas Lainnya		-	-
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Penerimaan		-	-
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Pengeluaran		-	-
Koreksi Ekuitas - Lain-lain		-	-
RK		-	-
EKUITAS AKHIR		1.094.209.818.682,90	1.009.507.038.878,43

Painan, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

LO			
No	Uraian	2022	
1	KEGIATAN OPERASIONAL		
2	PENDAPATAN		
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4	Pendapatan Pajak Daerah		
5	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	70.950.000
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
7	Lain-lain PAD yang Sah		
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	70.950.000
9			
10	PENDAPATAN TRANSFER		
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN		
12	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	-
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	-
14	Dana Alokasi Umum	Rp	-
15	Dana Alokasi Khusus	Rp	-
16	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Rp	-
17			
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA		
19	Dana Otonomi Khusus	Rp	-
20	Dana penyesuaian	Rp	-
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya	Rp	-
22			
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	-
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	-
26	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	-
27	Pendapatan Transfer	Rp	-
28			
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
30	Pendapatan Hibah	Rp	-
31	Pendapatan Dana Darurat	Rp	-
32	Pendapatan Lainnya	Rp	-
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	-
34	JUMLAH PENDAPATAN	Rp	70.950.000
35			
36	BEBAN		
37	Beban Pegawai	Rp	10.227.826.767
38	Beban Persediaan	Rp	1.359.961.550
39	Beban Jasa	Rp	7.001.169.436
40	Beban Pemeliharaan	Rp	6.500.586.104
41	Beban Perjalanan Dinas	Rp	2.277.493.698
42	Beban Bunga	Rp	-
43	Beban Subsidi	Rp	-
44	Beban Hibah	Rp	16.959.538.729

45	Beban Bantuan Sosial	Rp	-
46	Beban Penyusutan dan Penyisihan	Rp	-
47	Beban Transfer		
48	Beban Lain-lain	Rp	9.000.000
49	JUMLAH BEBAN	Rp	44.335.576.284
50			
51	Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp	(44.264.626.284)
52			
53	Surplus/Defisit Dari Non Operasional	Rp	-
54	Surplus Non Operasional	Rp	-
55	Surplus Penjualan Aset Non lancar	Rp	-
56	Surplus Penyelesaian Kew. Jk Panjang	Rp	-
57	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	-
58	Jumlah Surplus Non Operasional	Rp	-
59	DEFISIT NON OPERASIONAL	Rp	-
60	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp	-
61	Defisit Penyelesaian Kew.Jk. Panjang	Rp	-
62	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	-
63	Jumlah Defisit Non Operasional	Rp	-
64	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp	-
65			
66	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR		
67			
68	POS LUAR BIASA		
69	Pendapatan Luar Biasa	Rp	-
70	Beban Luar Biasa	Rp	-
71	JUMLAH POS LUAR BIASA	Rp	-
72			
73	SURPLUS/ DEFISIT- LO	Rp	(44.264.626.284)

Painan, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

DEVITRA S ST MM
NIP. 19720101 199701 1 001



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CALK)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/deficit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (Pergub 45, 2014). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Aset Lancar
- b) Aset Tetap
- c) Aset Lainnya
- d) Kewajiban Jangka Pendek
- e) Kewajiban Jangka Panjang
- f) Ekuitas Dana Lancar
- g) Ekuitas Dana Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, dan neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasarpenyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Standar Biaya Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca, yang mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan, informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 meliputi hal-hal berikut:

- BAB I : Pendahuluan mencakup maksud dan tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan.
- BAB II : Kebijakan keuangan, ekonomi makro, dan pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD mencakup Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD.
- BAB IV : Kebijakan Akuntansi mencakup entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD, basis akuntansi dan pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan SKPD serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD.
- BAB V : Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi, serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan, pada tingkat kabupaten sesuai perundang-undangan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten;
- b. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten;
- e. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten;
- f. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan, dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- g. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten;
- h. penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- i. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- j. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- k. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- l. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- m. penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten.

2.2 Kebijakan keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola APBD tahun anggaran 2021 mengacu kepada kebijakan keuangan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi hal berikut :

- 1) Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
- 2) Peningkatan efisien dan efektifitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja daerah.
- 3) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang berkelanjutan yang memberikan dampak besar sistem pengendalian pengelolaan pendapatan, aset/keuangan daerah.
- 4) Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator yang dipakai dalam pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 adalah menggunakan indikator pencapaian target kinerja yang menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 136 Tahun 2021, Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut:
 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
 1. Seksi Air Minum;

2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
1. Seksi Perencanaan Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang.
- f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- g. Bidang Irigasi dan Rawa, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
1. Seksi Perencanaan Irigasi dan Rawa;
 2. Seksi Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa; dan
 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa.
- h. Bidang Sungai dan Pantai, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
1. Seksi Perencanaan Sungai dan Pantai;
 2. Seksi Pengendalian, Pendayagunaan dan Konservasi Sungai dan Pantai; dan
 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai.
- i. UPTD; dan
- j. Jabatan Fungsional.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	481.200.000,00	70.950.000,00	14,74
<u>4.1.</u>	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u>	481.200.000,00	70.950.000,00	14,74
4.1.02.	Retribusi Daerah	481.200.000,00	70.950.000,00	14,74
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	40.000.000,00	32.100.000,00	80,25
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40.000.000,00	32.100.000,00	80,25
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	40.000.000,00	32.100.000,00	80,25
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	91.200.000,00	38.850.000,00	42,60
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	91.200.000,00	38.850.000,00	42,60
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	40.000.000,00	30.750.000,00	76,88
4.1.02.02.01.0007.	Retribusi Pemakaian Alat	50.000.000,00	6.900.000,00	13,80
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	350.000.000,00	-	-
4.1.02.03.07.0001.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00	-	-
5.	BELANJA DAERAH	187.847.344.596,00	181.706.971.611,00	96,73
<u>5.1.</u>	<u>BELANJA OPERASI</u>	38.616.063.513,00	37.193.000.555,00	96,31

5.1.01.	Belanja Pegawai	10.497.609.919,00	10.227.826.767,00	97,43
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.766.776.169,00	6.659.672.927,00	98,42
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	5.012.722.414,00	4.976.669.530,00	99,28
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	5.012.722.414,00	4.976.669.530,00	99,28
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	503.220.660,00	495.531.342,00	98,47
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	283.359.000,00	282.030.000,00	99,53
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	283.359.000,00	282.030.000,00	99,53
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	80.919.500,00	80.068.500,00	98,95
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	80.919.500,00	80.068.500,00	98,95
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	167.278.000,00	163.165.000,00	97,54
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	167.278.000,00	163.165.000,00	97,54
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	312.477.816,00	307.278.060,00	98,34
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	312.477.816,00	307.278.060,00	98,34
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.705.778,00	5.650.518,00	99,03
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.705.778,00	5.650.518,00	99,03
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	68.762,00	67.206,00	97,74
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	68.762,00	67.206,00	97,74
5.1.01.01.09.	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	311.715.301,00	308.446.754,00	98,95
5.1.01.01.09.0001.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	311.715.301,00	308.446.754,00	98,95
5.1.01.01.10.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.408.103,00	10.191.517,00	97,92
5.1.01.01.10.0001.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.408.103,00	10.191.517,00	97,92
5.1.01.01.11.	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	31.224.285,00	30.574.500,00	97,92
5.1.01.01.11.0001.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	31.224.285,00	30.574.500,00	97,92
5.1.01.01.12.	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	47.676.550,00	-	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	47.676.550,00	-	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.889.743.750,00	2.806.908.840,00	97,13

5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.889.743.750,00	2.806.908.840,00	97,13
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	841.090.000,00	761.245.000,00	90,51
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	766.090.000,00	686.245.000,00	89,58
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	415.900.000,00	362.100.000,00	87,06
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	308.805.000,00	286.795.000,00	92,87
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	41.385.000,00	37.350.000,00	90,25
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.211.695.594,00	17.138.850.788,00	94,11
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.519.748.530,00	1.350.601.550,00	88,87
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.519.748.530,00	1.350.601.550,00	88,87
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	31.674.500,00	22.815.000,00	72,03
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	320.000,00	320.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	490.654.950,00	396.366.680,00	80,78
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	94.597.380,00	93.698.837,00	99,05
5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	141.950.000,00	141.715.198,00	99,83
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	8.900.000,00	7.850.000,00	88,20
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	14.085.200,00	14.015.500,00	99,51
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	261.713.073,00	258.929.690,00	98,94
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	160.110.812,00	149.141.611,00	93,15
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.400.000,00	1.488.000,00	27,56
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.008.300,00	5.008.300,00	100,00

5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.997.570,00	9.997.570,00	100,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pertengkapkan Dinas	5.881.455,00	4.868.100,00	82,77
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.298.290,00	31.260.890,00	99,88
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.087.000,00	78.907.675,00	65,71
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.977.500,00	5.473.050,00	60,96
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50.820.000,00	50.600.000,00	99,57
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.002.500,00	14.903.449,00	99,34
5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan	40.000.000,00	39.972.000,00	99,93
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	5.720.000,00	5.720.000,00	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	7.384.312.662,00	7.001.169.436,00	94,81
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.490.514.124,00	3.220.345.366,00	92,26
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	86.000.000,00	79.500.000,00	92,44
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	168.000.000,00	168.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	28.000.000,00	15.000.000,00	53,57
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.240.132.000,00	1.089.641.000,00	87,86
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.000.000,00	-	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	66.900.000,00	66.900.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	564.000.000,00	563.880.000,00	99,98
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	273.000.000,00	273.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	333.630.000,00	333.630.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	151.445.000,00	114.138.000,00	75,37
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	121.178.000,00	120.775.500,00	99,67

5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	17.200.000,00	-	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	61.377.957,00	60.450.000,00	98,49
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	691.200,00	561.366,00	81,22
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	5.000.000,00	1.747.000,00	34,94
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	284.334.867,00	251.418.800,00	88,42
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.200.000,00	7.270.000,00	79,02
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.140.000,00	1.020.000,00	89,47
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.535.100,00	21.798.700,00	85,37
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	10.750.000,00	10.615.000,00	98,74
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	101.829.438,00	18.462.570,00	18,13
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	90.000.000,00	6.633.132,00	7,37
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.278.016,00	3.278.016,00	100,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.551.422,00	8.551.422,00	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.400.000,00	16.340.000,00	99,63
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.400.000,00	16.340.000,00	99,63
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.632.293.100,00	3.602.745.500,00	99,19
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	75.000.000,00	74.125.000,00	98,83
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	10.751.552,00	9.525.000,00	88,59
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	854.674.500,00	852.074.000,00	99,70
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.470.617.048,00	2.447.160.500,00	99,05
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan	750.000,00	750.000,00	100,00

Konstruksi Bangunan Gedung				
5.1.02.02.08.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekamata-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	151.000.000,00	150.705.000,00	99,80
5.1.02.02.08.0040.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekamata (Engineering) Terpadu	69.500.000,00	68.406.000,00	98,43
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	98.276.000,00	98.276.000,00	100,00
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	98.276.000,00	98.276.000,00	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	6.645.635.802,00	6.500.586.104,00	97,82
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.145.000,00	50.328.186,00	82,31
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	17.000.000,00	15.226.192,00	89,57
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	-	-
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.145.000,00	8.141.000,00	99,95
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.950.000,00	4.500.000,00	90,91
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	-	-
5.1.02.03.02.0367.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	11.000.000,00	7.494.734,00	68,13
5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.000.000,00	2.970.000,00	99,00

5.1.02.03.02.0448.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	2.200.000,00	2.146.260,00	97,56
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.133.567.417,00	1.129.965.000,00	99,68
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	612.647.000,00	612.647.000,00	100,00
5.1.02.03.03.0025.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	512.450.417,00	508.848.000,00	99,30
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	8.470.000,00	8.470.000,00	100,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.450.923.385,00	5.320.292.918,00	97,60
5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	921.095.524,00	836.483.000,00	90,81
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	74.045.349,00	73.390.000,00	99,11
5.1.02.03.04.0013.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	587.695.759,00	580.280.000,00	98,74
5.1.02.03.04.0053.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	3.430.341.125,00	3.414.699.618,00	99,54
5.1.02.03.04.0069.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	320.745.628,00	320.440.300,00	99,90
5.1.02.03.04.0080.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	72.000.000,00	50.000.000,00	69,44
5.1.02.03.04.0122.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	2.652.998.600,00	2.277.493.698,00	85,85
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.652.998.600,00	2.277.493.698,00	85,85
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.217.973.600,00	1.132.719.896,00	93,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.044.125.000,00	882.523.500,00	84,52
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	359.400.000,00	230.750.302,00	64,20

5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	9.906.758.000,00	9.826.323.000,00	99,19
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.906.758.000,00	9.826.323.000,00	99,19
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.906.758.000,00	9.826.323.000,00	99,19
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.906.758.000,00	9.826.323.000,00	99,19
5.2.	BELANJA MODAL	149.231.281.083,00	144.513.971.056,00	96,84
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1.776.500.082,00	-	-
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	1.776.500.082,00	-	-
5.2.01.01.03.	Belanja Modal Lapangan	1.776.500.082,00	-	-
5.2.01.01.03.0008.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	✓ 1.776.500.082,00	-	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.850.459.544,00	1.615.195.262,00	56,66
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	1.211.000.000,00	11.000.000,00	0,91
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.211.000.000,00	11.000.000,00	0,91
5.2.02.01.01.0003.	Belanja Modal Excavator	✓ 1.200.000.000,00	-	-
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	1.415.308.600,00	1.395.521.870,00	98,60
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.415.308.600,00	1.395.521.870,00	98,60
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	160.000.000,00	154.400.000,00	96,50
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.255.308.600,00	1.241.121.870,00	98,87
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.675.520,00	12.106.824,00	95,51

5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.675.520,00	12.106.824,00	95,51
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	4.095.520,00	4.095.000,00	99,99
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.580.000,00	8.011.824,00	93,38
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	211.475.424,00	196.566.568,00	92,95
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	211.475.424,00	196.566.568,00	92,95
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	61.050.000,00	55.499.000,00	90,91
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	137.925.424,00	128.567.568,00	93,22
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.290.901.905,00	2.238.457.250,00	97,71
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.290.901.905,00	2.238.457.250,00	97,71
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.290.901.905,00	2.238.457.250,00	97,71
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.199.365.605,00	2.147.307.250,00	97,63
5.2.03.01.01.0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka	91.536.300,00	91.150.000,00	99,58
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.313.419.552,00	140.660.318.544,00	98,84
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	124.727.863.379,00	123.528.222.782,00	99,04
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	118.472.017.348,00	118.294.962.820,00	99,85
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	118.472.017.348,00	118.294.962.820,00	99,85
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	6.255.846.031,00	5.233.259.962,00	83,65
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	6.255.846.031,00	5.233.259.962,00	83,65
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	17.477.222.473,00	17.023.762.062,00	97,41
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.827.982.800,00	7.523.961.362,00	96,12
5.2.04.02.01.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.827.982.800,00	7.523.961.362,00	96,12
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.345.343.350,00	4.283.906.350,00	98,59
5.2.04.02.04.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	4.345.343.350,00	4.283.906.350,00	98,59
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.303.896.323,00	5.215.894.350,00	98,34

5.2.04.02.07.0001.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	5.303.896.323,00	5.215.894.350,00	98,34
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	108.333.700,00	108.333.700,00	100,00
5.2.04.04.04.	Belanja Modal Jaringan Gas	108.333.700,00	108.333.700,00	100,00
5.2.04.04.04.0004.	Belanja Modal Jaringan BBM	108.333.700,00	108.333.700,00	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(187.366.144.596,00)	(181.636.021.611,00)	96,94

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 yang menyebabkan rendahnya daya serap realisasi keuangan diantaranya: adanya kegiatan yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan pada satu bidang sehingga proses pelaksanaan kegiatan tidak optimal, adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan belanja serta penyajian laporan keuangan.

4.1 Entitas Pelaporan

Sesuai ketentuan yang berlaku, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penata usahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca yang disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan entitas pelaporan dari Laporan Keuangan Daerah, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Hal anggaran disusun berdasarkan *basis kas*, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran data konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang samadengan basis pengukuran pada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

b. Belanja-LRA

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

c. Pendapatan-LO

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

d. Beban

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian beban menggunakan akuntansi berbasis akrual.

e. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Inventasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian aset adalah sebagai berikut:

1) Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

2) Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

3) Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan caralainnya seperti donasi.

4) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

5) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan bakuan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui

kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

6) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

7) Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai siap dipakai. Biaya perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan pembongkaran bangunan lama.

8) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja,

sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

9) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

f. Kewajiban

Dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g. Ekuitas Dana

Merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

4.3.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada penyusunan laporan keuangan tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu kepada ketentuan tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, kemudian diperkuat dengan dilahirkannya kebijakan akuntansi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 93 tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1 Pendapatan		Rp 70,950,000.00	Rp 72,650,000.00
Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada TA 2022, Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp. 481,200,000, dan terealisasi sebesar Rp.70.950.000, yang terdiri dari:			
a	Pendapatan Asli Daerah	Rp 481,200,000.00	Rp 72,650,000.00
		Rp 481,200,000.00	Rp 72,650,000.00
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya terdiri dari Retribusi Daerah. Target Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 481,200,000, dengan realisasi sebesar Rp.70.950.000, atau 14,74% . Jika dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp.72.650.000 realisasi TA 2022 turun sebesar Rp.1.700.000.			
Perbandingan antara anggaran dengan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:			
		Anggaran 2022	Realisasi 2022
		Realisasi 2021	
	1	Retribusi Daerah	Rp 33,600,000.00
	2	Lain - Lain PAD yang Sah	Rp 39,050,000.00
	Total	Rp 481,200,000.00	Rp 72,650,000.00
5.1.2 Belanja		Rp 181,706,971,611.00	Rp 168,960,417,250.00
Pada TA 2022 Belanja dianggarkan sebesar Rp.187.847.344.596, dan direalisasikan sebesar Rp.181.706.971.611 atau sebesar 96,73%. Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,21% dibandingkan penyerapan tahun 2021 yang sebesar 87,52%. Sedangkan untuk realisasi Belanja, bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp.168.960.417.250, realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.12.746.554.361 atau 7,5%.			
Secara rinci realisasi belanja TA 2022 dan 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :			
1)	Belanja Operasi	Rp 37,193,000,555.00	Rp 40,059,970,218.00
Belanja Operasi TA 2022 dianggarkan sebesar Rp.38.616.063.513 dan direalisasikan sebesar Rp.37.193.000.555 atau 96.31%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.40.059.970.218, realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.2.866.969.663 atau 7.1%. Belanja Operasi terdiri dari:			
a	Belanja Pegawai	Rp 10,227,826,767.00	Rp 11,713,824,568.00
Belanja Pegawai tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.10.497.609.919 dan direalisasikan sebesar Rp.10.227.826.767 atau 97,43% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.11.713.824.568 realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.1.485.997.801 atau 12,6%. Jumlah tersebut merupakan realisasi untuk pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2022 dan 2021. Belanja Pegawai 2022 dapat dirinci sebagai berikut:			
		Anggaran 2022	Realisasi 2022
		Realisasi 2021	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 6,766,776,169.00	Rp 7,700,816,861.00
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp 2,889,743,750.00	Rp 3,221,457,707.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp 841,090,000.00	Rp 791,550,000.00
	Total	Rp 10,497,609,919	Rp 11,713,824,568
b	Belanja Barang dan Jasa	Rp 18,211,695,594.00	Rp 14,062,009,650.00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.18.211.695.594 dan direalisasikan sebesar Rp.17.138.850.788 atau 94,11%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.14.062.009.650, realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.3.076.841.138 atau 21,8%.			
Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:			
		Anggaran 2022	Realisasi 2022
		Realisasi 2021	
	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 1,519,748,530.00	Rp 1,413,014,896.00
	Belanja Bahan/Material		
	Belanja Jasa Kantor	Rp 3,490,514,124.00	Rp 2,924,909,708.00
	Belanja Premi Asuransi		
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp 101,829,438.00	Rp 18,462,570.00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
	Belanja Cetak dan Penggandaan		
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		
	Belanja Makanan dan Minuman		
	Belanja Pakaian Kerja		
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2,652,998,600.00	Rp 2,277,493,698.00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	61,145,000.00	Rp	50,328,186.00	Rp	3,711,771,280.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	1,133,567,417.00	Rp	1,129,965,000.00		
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	5,450,923,385.00	Rp	5,320,292,918.00		
Belanja Jasa Konsultansi						
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	Rp	9,000,000.00	Rp	9,000,000.00		
Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	Rp	45,000,000.00	Rp	45,000,000.00		
Belanja Honorarium Non Pegawai						
Honorarium PNS						
Honorarium Non PNS						
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	16,400,000.00	Rp	16,340,000.00	Rp	124,500,000.00
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	Rp	3,632,293,100.00	Rp	3,602,745,500.00	Rp	4,438,172,699.00
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	Rp	98,276,000.00	Rp	98,276,000.00	Rp	287,311,310.00
Total	Rp	18,211,695,594.00	Rp	17,138,850,788.00	Rp	14,062,009,650.00

c Belanja Hibah Rp **9,906,758,000.00** Rp **9,826,323,000.00** Rp **14,284,136,000.00**
 Belanja Hibah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 9.906.758.000 dan direalisasikan sebesar Rp.9.826.323.000 atau 99,19%. Belanja Hibah 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp	9,906,758,000.00	Rp 9,826,323,000.00	14,284,136,000.00
Total	Rp	9,906,758,000	Rp 9,826,323,000	14,284,136,000

2) Belanja Modal Rp **149,231,281,083.00** Rp **144,513,971,056.00** Rp **128,900,447,032.00**

Belanja Modal TA 2022 dianggarkan sebesar Rp.149.231.281.083 dan direalisasikan sebesar Rp.144.513.971.056 atau 96,84%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 128.900.447.032 realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.15.613.524.024 atau 12,1 %. Belanja Modal terdiri dari:

		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Tanah	Rp	1,776,500,082.00		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	2,850,459,544.00	Rp 1,615,195,262.00	
Belanja Modal Alat Besar			Rp	502,000,000.00
Belanja Modal Alat Angkutan			Rp	518,312,239.00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur			Rp	82,500,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	2,290,901,905.00	Rp 2,238,457,250.00	
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga			Rp	248,004,544.00
Belanja modal Komputer			Rp	36,325,456.00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja			Rp	9,539,350,475.00
Belanja modal Pengadaan Jalan	Rp	118,472,017,348.00	Rp 118,294,962,820.00	85,354,445,111.00
Belanja modal Pengadaan Jembatan	Rp	6,255,846,031.00	Rp 5,233,259,962.00	1,057,507,300.00
Belanja Modal Bangunan Air	Rp	17,477,222,473.00	Rp 17,023,762,062.00	31,524,730,207.00
Belanja Modal Jaringan Gas	Rp	108,333,700.00	Rp 108,333,700.00	
Belanja Modal Instalasi			Rp	37,271,700.00
Jumlah	Rp	149,231,281,083.00	Rp 144,513,971,056.00	128,900,447,032.00

a)	Tanah		Rp	129.929.240.159	Rp	130.118.227.315
	Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian penambahan dan pengurangan aset tanah tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:					
	Saldo awal	Rp		130.118.227.315		
	Mutasi Antar SKPD (-)	Rp		(188.987.156)		
	Saldo Per 31 Des 2022	Rp		129.929.240.159		
	Mutasi tambah Aset Tetap Tanah berasal dari pengadaan tanah, baik yang berasal dari rekening belanja modal maupun dari rekening belanja barang/jasa. Pengakuan dan pencatatan Aset Tetap Tanah berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap.					
b)	Peralatan dan Mesin		Rp	16.664.590.941	Rp	15.706.450.968
	Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:					
	Saldo awal	Rp		15.706.450.968		
	Belanja Modal (+)	Rp		1.615.195.262		
	Belanja Pegawai/Barjas yang dikapitalisir (+)	Rp		89.170.250		
	Reklasifikasi (+)	Rp		100.156.000		
	Mutasi Antar SKPD (-)	Rp		-415.420.240		
	Penghapusan (-)	Rp		-425.371.379		
	Lain-lain (-)	Rp		(5.589.920)		
	Saldo Per 31 Des 2022	Rp		16.664.590.941		
c)	Gedung dan Bangunan		Rp	78.611.632.405	Rp	110.246.891.711
	Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:					
	Saldo awal	Rp		110.246.891.711		
	Belanja Modal (+)	Rp		2.238.457.250		
	Belanja Pegawai/Barjas yang dikapitalisir (+)	Rp		452.899.750		
	Reklasifikasi (+)	Rp		61.635.444		
	Mutasi Antar SKPD (-)	Rp		(34.063.582.110)		
	Penghapusan (-)	Rp		(10.000.000)		
	Reklasifikasi (-)	Rp		(266.045.000)		
	Lain-lain (-)	Rp		(48.624.640)		
	Saldo Per 31 Des 2022	Rp		78.611.632.405		
d)	Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp	2.066.268.937.637	Rp	1.915.479.806.193
	Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:					
	Saldo awal	Rp		1.915.479.806.193		
	Belanja Modal (+)	Rp		140.660.318.544		
	Belanja Pegawai/Barjas yang dikapitalisir (+)	Rp		2.426.127.500		
	Hibah (+)	Rp		10.020.798.000		
	Reklasifikasi (+)	Rp		170.504.475		
	Mutasi Antar SKPD (-)	Rp		(1.970.742.264)		
	Reklasifikasi (-)	Rp		(139.062.000)		
	Lain-lain (-)	Rp		(378.812.811)		
	Saldo Per 31 Des 2022	Rp		2.066.268.937.637		
e)	Aset Tetap Lainnya		Rp	291.390.542	Rp	291.390.542
	Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Lainnya tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:					
	Saldo awal	Rp		291.390.542		
	Mutasi antar SKPD (+)	Rp		-		
	Mutasi Antar SKPD (-)	Rp		-		
	Saldo Per 31 Des 2022	Rp		291.390.542		
f)	Konstruksi Dalam Pengerjaan		Rp	89.103.125.131	Rp	89.030.314.050
	Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:					
	Saldo awal	Rp		89.030.314.050		
	Reklasifikasi (+)	Rp		266.045.000		
	Reklasifikasi (-)	Rp		(193.233.919)		
	Saldo Per 31 Des 2021	Rp		89.103.125.131		
	Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan secara detail disajikan pada Lampiran Aset Tetap.					
g)	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Rp	(1.087.880.003.933)	Rp	(1.087.880.003.933)
	Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang terakumulasi sampai tahun pelaporan. Penghitungan dan pengakuan penyusutan dilakukan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini penyusutan dihitung secara tahunan.					
3)	Aset Lainnya		Rp	808.419.022	Rp	820.819.022
	Merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Aset Lainnya tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:					
	(a)	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	Rp	-	Rp	-
	(b)	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Rp	-	Rp	-
	(c)	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Rp	-	Rp	-

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban-LO, dan Surplus/Defisit Operasional.

5.2.1 Pendapatan Laporan Operasional

Pendapatan pada Laporan Operasional di Tahun 2022 adalah sebesar Rp.70.950.000. Pada Laporan Realisasi Anggaran nilai Pendapatan adalah sebesar Rp.70.950.000, sehingga tidak terdapat perbedaan antara pendapatan pada LO dengan pendapatan pada LRA. Rincian Pendapatan-LO dan perbedaan saldo dengan Pendapatan LRA dapat diringkas sebagai berikut:

	Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Varians
1)	Pendapatan Asli Daerah	Rp 70.950.000,00	Rp 70.950.000,00	-
	Total	Rp 70.950.000,00	Rp 70.950.000,00	-

5.2.2 Beban Laporan Operasional

Beban pada Laporan Operasional di Tahun 2022 adalah sebesar Rp.44.375.186,185. Pada Laporan Realisasi Anggaran nilai Beban adalah sebesar Rp.37.193.000,555, sehingga Beban pada LRA lebih rendah dibanding Beban pada LO sebesar Rp.7.182.185,630. Rincian Beban-LO dan perbedaan saldo dengan Beban LRA dapat diringkas sebagai berikut:

	Rincian	Beban-LO	Beban-LRA	Varians
1)	Beban Pegawai	Rp 10.227.826.767	Rp 10.227.826.767	-
2)	Beban Persediaan	Rp 1.359.961.550	Rp 1.350.601.550	9.360.000,00
3)	Beban Jasa	Rp 7.040.779.337	Rp 7.001.169.436	39.609.901,00
4)	Beban Pemeliharaan	Rp 6.500.586.104	Rp 6.500.586.104	-
5)	Beban Perjalanan Dinas	Rp 2.277.493.698	Rp 2.277.493.698	-
6)	Beban Bunga	Rp -	Rp -	-
7)	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	-
8)	Beban Hibah	Rp 16.959.538.729	Rp 9.826.323.000	7.133.215.729,00
9)	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	-
10)	Beban Penyusutan dan Penyisihan	Rp -	Rp -	-
11)	Beban Transfer	Rp -	Rp -	-
12)	Beban Lain-lain	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	-
	Total	Rp 44.375.186.185	Rp 37.193.000.555	7.182.185.630,00

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2022 dengan nilai Aset sebesar Rp.1.304.368.812,729, Kewajiban sebesar Rp.33.499.042,657 dan Ekuitas sebesar Rp.1.270.869.770,072. Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

5.3.1 ASET

1)	Aset Lancar	Rp 1.304.368.812.729	Rp 1.191.216.902.421
	Aset lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan.	Rp 10.571.480.825	Rp 17.403.006.553

Pada 31 Desember 2022 Aset Lancar berjumlah Rp.10,571,480,825 yang terdiri dari:

a)	Kas di Kas Daerah	Rp -	Rp -
b)	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
c)	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp -
d)	Kas Lainnya	Rp -	Rp -
e)	Piutang Pajak Netto	Rp -	Rp -
f)	Piutang Retribusi Netto	Rp -	Rp -
g)	Piutang Kepada Pihak Ketiga Netto	Rp -	Rp -
h)	Piutang Lainnya Netto	Rp -	Rp -
i)	Beban Dibayar Dimuka	Rp -	Rp -
k)	Persediaan	Rp 10.571.480.825	Rp 17.403.006.553
l)	Aset Lancar Lainnya	Rp -	Rp -
	Jumlah Aset Lancar Per 31 Desember 2022	Rp 10.571.480.825	Rp 17.403.006.553

Persediaan merupakan jumlah persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 dan 2021. Persediaan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp 17.403.006.553
Mutasi Tambah	Rp 10.861.787.272
Mutasi Kurang	-Rp 17.693.313.000
Saldo Akhir	Rp 10.571.480.825

Rincian lebih detail Saldo Akhir Persediaan sebesar Rp.10,571,480,825 dapat dilihat pada Lampiran Persediaan.

2)	Aset Tetap	Rp 1.292.988.912.882	Rp 1.172.993.076.846
----	------------	----------------------	----------------------

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 dan 2021. Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Untuk aset tetap TA 2022, pencatatan dilakukan dengan menggunakan saldo awal sesuai Surat Keputusan Bupati No.900.4/540/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Saldo Awal Neraca SKPD.

Untuk pengadministrasian Aset Tetap, dilakukan secara terkomputerisasi dengan menggunakan Aplikasi SIPKD-Aset. Aplikasi ini menghasilkan output berupa Kartu Inventaris Barang (KIB), yang menjelaskan nilai aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan rincian setiap aset tetap (meliputi merk, tahun perolehan, spesifikasi, nomor rangka, nomor mesin, dan lain-lain). Namun, untuk penghitungan penyusutan aset tetap setiap tahunnya, digunakan alat bantu Microsoft Office Excel yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis dan jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(a)	Tanah	Rp 129.929.240.159
(b)	Peralatan dan Mesin	Rp 16.664.590.941
(c)	Gedung dan Bangunan	Rp 78.611.632.405
(d)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 2.066.268.937.637
(e)	Aset Tetap Lainnya	Rp 291.390.542
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 89.103.125.131
	Jumlah Aset Tetap Sebelum Penyusutan	Rp 2.380.868.916.815
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2021	Rp (1.087.880.003.933)
	Jumlah Aset Tetap Tahun 2022	Rp 1.292.988.912.882

(d)	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	-	Rp	-
(e)	Aset Tidak Berwujud	Rp	241.523.416	Rp	241.523.416
(f)	Akumulasi Amortisasi	-Rp	241.523.416	-Rp	241.523.416
(g)	Aset Lain-lain	Rp	808.419.022	Rp	820.819.022
(h)	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	-	Rp	-
	Jumlah	Rp	808.419.022	Rp	820.819.022
	Aset Tidak Berwujud	Rp	241.523.416	Rp	241.523.416
Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tidak berwujud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 dan 2021. Aset Tidak Berwujud 2022 dapat dirinci sebagai berikut:					
	Saldo Awal	Rp	241.523.416		
	Mutasi Tambah	Rp	-		
	Mutasi Kurang	Rp	-		
	Saldo Akhir	Rp	241.523.416		
	Aset Lain-lain	Rp	808.419.022	Rp	820.819.022
Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Lain-lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 dan 2021. Aset Lain-lain 2022 dapat dirinci sebagai berikut:					
	Saldo Awal	Rp	820.819.022		
	Mutasi Tambah	Rp	-		
	Mutasi Kurang	-Rp	12.400.000		
	Saldo Akhir	Rp	808.419.022		

5.3.2 KEWAJIBAN

		Rp	33.499.042.657	Rp	33.579.347.452
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi SKPD pada masa yang akan datang. Kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:					
1)	Kewajiban Jangka Pendek	Rp	33.499.042.657	Rp	33.579.347.452
2)	Kewajiban Jangka Panjang	Rp	-	Rp	-
	Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022	Rp	33.499.042.657	Rp	33.579.347.452

Kewajiban Jangka Pendek Rp 33.499.042.657 Rp 33.579.347.452

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek mencakup Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang Belanja, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut:

a)	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	-	Rp	-
b)	Utang Bunga Denda dan Commitment Fee	Rp	-	Rp	-
c)	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	-	Rp	-
d)	Utang pada Pihak Ketiga	Rp	33.499.042.657	Rp	33.579.347.452
e)	Utang Beban	Rp	-	Rp	-
f)	Utang Jangka Pendek lainnya	Rp	-	Rp	-
	Total	Rp	33.499.042.657	Rp	33.579.347.452

Utang pada Pihak Ketiga Rp 33.499.042.657 Rp 33.579.347.452

Jumlah tersebut merupakan Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021. Pengakuan Utang pada Pihak Ketiga dilakukan berdasarkan perbandingan persentase pembayaran kegiatan dengan persentase penyelesaian fisik kegiatan, serta konfirmasi dari pihak ketiga terkait. Utang tahun 2021 telah dilunasi sebanyak yang terlampir.

	Pekerjaan	Jumlah	Pihak Ketiga
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Dwikora (IPDMIP Loan 2021)	Rp 115.309.346	CV. Tiga Saudara Kontraktor
2	Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam	Rp 4.605.350	CV. Mahendri Pratama
	Total	Rp 119.914.696	

Utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

	Pekerjaan	Jumlah	Pihak Ketiga
1	Relokasi RSUD Dr. M. Zein Painan	Rp 33.256.453.168	
2	Jembatan Bukit Kaciak - Koto Luar Tarusan	Rp 4.817.038	
3	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pembangunan RSUD Baru	Rp 49.847.000	
4	Keg. Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai, Paket Pekerjaan Normalisasi	Rp 9.381.300	
5	Keg. Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai, Paket Pekerjaan Normalisasi	Rp 8.915.100	
6	Keg. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya, Paket	Rp 18.000.000	
7	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, Paket	Rp 7.005.300	
8	Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, Paket	Rp 6.992.100	
9	Keg. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian	Rp 9.395.250	
10	Keg. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian	Rp 6.995.000	
11	Keg. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai, Paket Pekerjaan Cuci parit kp.	Rp 2.231.500	
12	Keg. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan), Paket	Rp 79.400.000	
13	Hutang Telepon	Rp 45.457	
14	Hutang Listrik	Rp 20.764.044	
15	AIR PDAM PCC	Rp 17.339.400	
16	AIR PDAM UPTD	Rp 1.330.500	
17	AIR PDAM PU	Rp 130.500	
	Total	Rp 33.499.042.657	

5.3.3 EKUITAS

Rp 1.270.869.770,072 Rp 1.157.637.554,968,00

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya.

Nilai likuiditas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 berjumlah Rp.1,270,869,770,072

5.4. PENJEL/ SAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca dan menggambarkan pergerakan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktifitas Operasional pada tahun Pelaporan.

Ekuitas Awal	Rp	1.009.507.038.878,43	
Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal tahun 2022 dan 2021.			
Surplus/Defisi : LO	Rp	(44.304.236.185,00)	
Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2020 dan 2019.			
RK/PPKD	Rp	181.636.021.611,00	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	Rp	-	
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2020 terdiri atas :			
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	Rp	(52.668.615.522,53)	
Koreksi Ekuitas - Utang		-	
Koreksi Ekuitas - Setara Kas Lainnya		-	
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Penerimaan		-	
Koreksi Ekuitas - Lain-lain		-	
RK		-	
		52.668.615.523	
Ekuitas Akhir	Rp	1.094.170.208.781,90	Rp 1.009.507.038.878,43
Jumlah tersebut merupakan ekuitas akhir 2022 dan 2021. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal dengan surplus/defisit LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.			

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, yang diharapkan dapat memperjelas terhadap Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Sago, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA S ST MM
NIP. 19720101 199704 1 001